

BAB V

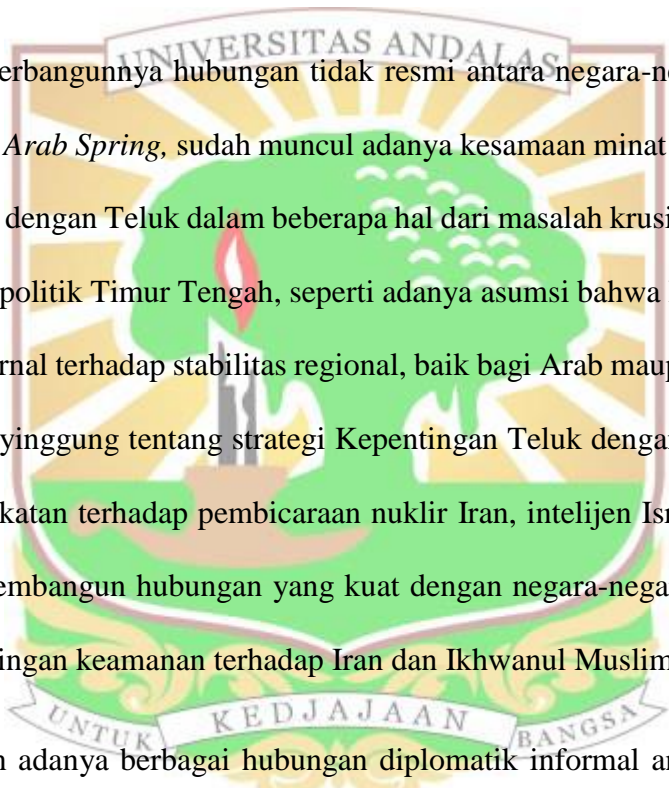
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis faktor yang menyebabkan perubahan kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab sehingga melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel di tahun 2020. Seperti yang sebelumnya kita ketahui, Uni Emirat Arab merupakan salah satu negara yang tergabung dalam Liga Arab, di mana Liga Arab sendiri memiliki kebijakan agar negara anggotanya melakukan boikot terhadap kerjasama dengan Israel, demi membela Palestina. Selain itu, Uni Emirat Arab bersama negara-negara Arab lainnya terus berupaya mendukung perdamaian Palestina – Israel, seperti dengan melakukan konferensi, serta mencetuskan *Arab Peace Initiative* yang mengisyaratkan terobosan baru dalam kesediaan Arab secara resmi untuk menciptakan perdamaian yang adil dan menyeluruh di Timur Tengah. Hal tersebut berangkat dari keyakinan Negara-negara Arab bahwa solusi militer untuk penyelesaian konflik tidak akan mencapai perdamaian atau memberikan keamanan bagi para pihak, sehingga Israel diminta untuk mempertimbangkan kembali kebijakannya, melakukan penarikan penuh dari semua wilayah yang pernah diduduki Israel, pencapaian solusi yang adil untuk permasalahan pengungsi Palestina, mempertimbangkan konflik Arab-Israel berakhir dengan mengadakan perjanjian damai dan memberikan jaminan keamanan bagi Negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Berangkat dari berbagai upaya yang ingin dicapai negara-negara Arab dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, berbagai peristiwa pun kerap

terjadi yang secara tidak langsung mempengaruhi upaya tersebut. Misalnya peristiwa *Arab Spring* yang mengakibatkan kondisi yang tidak aman di wilayah Teluk maupun Arab. Politik sektarian berkembang pasca *Arab Spring* ketika ketegangan antara Arab Saudi dan Iran meningkat, dan menanggapi hal ini para *decision maker* di negara-negara Teluk mengaitkannya dengan intervensionisme Iran dan sebagai bentuk usaha ikhwanul muslimin untuk menggulingkan monarki Teluk satu per satu.



Sejak terbangunnya hubungan tidak resmi antara negara-negara GCC dan Israel sebelum *Arab Spring*, sudah muncul adanya kesamaan minat antara pembuat kebijakan Israel dengan Teluk dalam beberapa hal dari masalah krusial yang muncul ke permukaan politik Timur Tengah, seperti adanya asumsi bahwa Iran merupakan ancaman eksternal terhadap stabilitas regional, baik bagi Arab maupun Israel. Oleh sebab itu, menyinggung tentang strategi Kepentingan Teluk dengan Israel, selama adanya peningkatan terhadap pembicaraan nuklir Iran, intelijen Israel mulai lebih aktif dalam membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara Teluk terkait dengan kepentingan keamanan terhadap Iran dan Ikhwanul Muslimin.

Dengan adanya berbagai hubungan diplomatik informal antara Israel dan negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab tersebut, semakin menunjukkan adanya perubahan dalam kepentingan regional dan opini publik. Kemudian perjanjian Abraham lahir untuk melanjutkan keinginan Arab untuk mencapai perdamaian Palestina-Israel sebelumnya yang dimuat dalam *Arab Peace Initiative*. Keberatan regional Timur Tengah dalam menyetujui perjanjian Abraham cenderung di lemahkan oleh posisi Israel yang cenderung kuat di kawasan Timur Tengah, dikarenakan Israe banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara

Teluk termasuk Uni Emirat Arab. Kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan politik, pertahanan dan keamanan serta ekonomi.

Hasil analisis dari penelitian ini menemukan bahwa penyebab perubahan kebijakan dikarenakan karakteristik pemimpin Uni Emirat Arab yang mempengaruhi sistem kepemimpinannya dan arah kebijakannya, adanya dukungan dari *civil society* Uni Emirat Arab terhadap normalisasi karena menganggap isu Palestina sudah tidak terlalu eksis dan lebih penting untuk mengedepankan kepentingan nasional sendiri, kemudian dukungan dari birokrasi Uni Emirat Arab terhadap normalisasi yang bersangkutan dengan kepentingan UEA terhadap Negara lain di berbagai bidang serta adanya faktor eksternal seperti pengaruh ancaman Iran dan pengaruh Amerika Serikat sebagai bagian dalam memerangi Iran.

Dari hasil penelitian tersebut, menurut penulis faktor-faktor tersebut saling berkesinambungan sehingga menjadi pemicu terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab sehingga menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Hal tersebut terjadi karena sejak awal, presiden UEA sudah tidak memiliki sifat kepercayaan terhadap Iran, ikhwanul muslimin dan ekstrimis lainnya karena dianggap kerap menimbulkan ancaman di kawasan Timur Tengah, sehingga UEA melihat dengan keadaan tersebut, ia butuh pihak yang bisa diajak untuk bekerja sama. Sementara itu, isu Palestina pun sudah melemah karena adanya isu-isu baru di Timur Tengah, seperti rivalitas Iran.

Adanya perubahan tindakan ini menyebabkan kepentingan Uni Emirat Arab pun berubah. Perubahan kepentingan tersebut dapat diketahui bahwa sebelumnya kepentingan Uni Emirat Arab lebih banyak berada dalam perjuangan pembebasan

Palestina dari aneksasi Israel. Dengan demikian, UEA merasa penting untuk mengedepankan kepentingan nasionalnya terlebih dahulu. Hal tersebut juga didukung oleh adanya Amerika Serikat sebagai pihak eksternal yang secara tidak langsung juga berhubungan dengan Israel. UEA menganggap Israel sebagai mitra yang tepat karena memadai dari segi keamanan dan pertahanan.

5.2 Saran

Dalam menganalisis penelitian menggunakan konsep *foreign policy change* dari Charles F. Herman ini, peneliti memiliki kendala dikarenakan banyaknya aktor yang terlibat dan dianalisis. Dari tingkat individu, kelompok, dan juga level sistem, sehingga peneliti menyarankan untuk menggunakan konsep alternatif dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri, misalnya dapat dilihat dari aspek aktor domestiknya saja atau eksternalnya saja. Kemudian dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun kesepakatan normalisasi telah direalisasikan pada Agustus 2020, namun kesepakatan normalisasi tersebut masih menuai kontra dari berbagai pihak, khususnya Negara-negara Arab dan organisasi Islam terhadap bentuk implikasi nyata kesepakatan tersebut dalam mewujudkan perdamaian Palestina. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya penelitian berikutnya yang akan menganalisis bagaimana implikasi kebijakan normalisasi ini terhadap perdamaian Palestina.